

**PERANAN PEMERINTAH KOTA BINJAI DALAM SOSIALISASI PRODUK
HUKUM DAERAH YANG BERSIFAT PENGATURAN
DI KOTA BINJAI
(Studi di Pemerintah Kota Binjai)**

ABSTRAK

Fransiscus Aparius Endri Tambunan *

Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat memberikan hak kepada Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk membentuk produk hukum daerah yang bersifat pengaturan seperti Peraturan Daerah. Agar produk hukum daerah ini dapat diketahui oleh seluruh masyarakat di Kota Binjai maka perlu dilakukan sosialisasi terhadap produk hukum tersebut, disinilah letak peran dari Pemerintah Daerah Kota Binjai, bagaimana implementasi sosialisasi produk hukum daerah dan hambatan-hambatan alam sosialisasi produk hukum daerah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris, Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data primer Hasil penelitian dari tesis ini antara lain: Peranan Pemerintah Kota Binjai dalam mensosialisasikan produk hukum daerahnya juga terlihat dari keseriusan Pemerintah Kota Binjai agar produk hukum diketahui secara menyeluruh kepada seluruh masyarakat di wilayahnya melalui Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Binjai. Implementasi dari sosialisasi produk hukum daerah oleh Pemerintah Kota Binjai terlihat dari beberapa bentuk sosialisasi terhadap produk hukum daerah yakni: Pertama, Penyebaran Buku Himpunan Lembaran Daerah (Perda) dan Himpunan Berita Daerah (Peraturan Wali Kota) di Perangkat Daerah Kota Binjai dan Instansi Vertikal yg ada di Kota Binjai; Kedua, Publikasi Produk Hukum Daerah (Perda dan Perwali) lewat Website dan Aplikasi JDIH Kota Binjai dan; Ketiga, Sosialisasi langsung oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa ke semua Perangkat Daerah di Kota Binjai untuk menjelaskan secara detail mengenai teknis Produk Hukum Daerah yg dimaksud. Hambatan yang dialami Pemerintah Kota Binjai dalam melaksanakan sosialisasi produk hukum daerah dikarenakan masyarakat yang masih kurang inisiatif untuk mencari informasi tentang produk hukum daerah Kota Binjai. Sosialisasi langsung oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa ke semua Perangkat Daerah di Kota Binjai untuk menjelaskan secara detail mengenai teknis Produk Hukum Daerah jarang dilakukan karena keterbatasan anggaran. Upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan sosialisasi produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dengan mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa setiap produk hukum daerah Kota Binjai dapat diakses secara digital oleh publik, dan menyediakan anggaran agar lingkup penyebarannya lebih luas lagi

Kata Kunci : Peranan, Pemerintah Kota Binjai, Sosialisasi, Produk Hukum Daerah Yang Bersifat Pengaturan

*Mahasiswa Program Pascasarjana Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

**THE ROLE OF THE BINJAI CITY GOVERNMENT IN THE
SOCIALIZATION OF REGIONAL LEGAL PRODUCTS THAT HAVE A
REGULATORY NATURE
IN BINJAI CITY
(Study at Binjai City Government)**

ABSTRACT
Fransiscus Aparius Endri Tambunan *

In administering Regional Government, the Central Government gives the Regional Government and the Regional People's Representative Council the right to form regional legal products that are regulatory in nature, such as Regional Regulations. So that this regional legal product can be known by the entire community in Binjai City, it is necessary to socialize this legal product. This is where the role of the Regional Government of Binjai City lies, how to implement the socialization of regional legal products and the natural obstacles to socializing these regional legal products. The research results from this thesis include: The role of the Binjai City Government in socializing its regional legal products can also be seen from the seriousness of the Binjai City Government so that legal products are thoroughly known to all communities in its area through the Document Network and Legal Information (JDIH) Binjai City. The implementation of the socialization of regional legal products by the Binjai City Government can be seen from several forms of socialization of regional legal products, namely: First, the distribution of Regional Gazette Collection Books (Perda) and Regional News Associations (Mayor Regulations) in Binjai City Regional Apparatus and existing Vertical Agencies in Binjai City; Keda, Publication of Regional Legal Products (Perda and Perwali) via the Binjai City JDIH Website and Application and; Third, direct outreach by the initiating regional apparatus to all regional apparatus in Binjai City to explain in detail the technicalities of the regional legal product in question. The obstacles experienced by the Binjai City Government in carrying out socialization of regional legal products are because the public still lacks the initiative to seek information about regional legal products in the city of Binjai. Direct outreach by the Initiating Regional Apparatus to all Regional Apparatus in Binjai City to explain in detail the technicalities of Regional Legal Products is rarely carried out due to budget limitations. Efforts to Overcome Obstacles in Implementing the Socialization of Regulatory Regional Legal Products by socializing to the public that every regional legal product in the City of Binjai can be accessed publicly, providing a budget to socialize the Regional Regulations so that the scope of dissemination is wider.

Keywords: Role, Binjai City Government, Socialization, Regulatory Regional Legal Products

* Student of the Postgraduate Program in the Legal Studies Program at the Islamic University of North Sumatra